



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Evaluasi Kebijakan Penyaluran LPG 3 Kg: Efektivitas Subsidi Rumah Tangga Miskin vs Penggunaan Industri

Aris Munandar<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Tamansiswa Palembang,  
[arismunandar@unitasopalembang.ac.id](mailto:arismunandar@unitasopalembang.ac.id)

Corresponding Author: [arismunandar@unitasopalembang.ac.id](mailto:arismunandar@unitasopalembang.ac.id)

**Abstract:** *Indonesia's 3 kg LPG subsidy policy is designed to help poor households, but in practice there has been abuse by small industry sectors and commercial enterprises, which reduces the effectiveness of this policy. This study aims to evaluate the distribution of 3 kg LPG gas, identify problems in its implementation, and provide recommendations to improve the accuracy of subsidy distribution. The research method used is a qualitative approach with in-depth interviews with poor households, small business actors, and related policy analysis. The results of the study show that 3 kg of LPG gas is widely used by the commercial business sector, which causes scarcity for poor households. In addition, weak distribution supervision mechanisms and complex bureaucracy exacerbate the abuse of these subsidies. The findings underscore the importance of policy revision and strengthening oversight through digital technology to track distribution more accurately. The implications of this study include increasing transparency and accountability in the distribution of energy subsidies, as well as improving law enforcement mechanisms to reduce inequities in access to subsidies. This policy recommendation is expected to support the government in creating fairer and more targeted subsidy governance, as well as improving the welfare of the poor.*

**Keywords:** *Evaluation, Distribution, Effectiveness*

**Abstrak:** Kebijakan subsidi LPG 3 kg Indonesia dirancang untuk membantu rumah tangga miskin, tetapi dalam praktiknya telah terjadi penyalahgunaan oleh sektor industri kecil dan perusahaan komersial, yang mengurangi efektivitas kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi distribusi gas LPG 3 kg, mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaannya, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akurasi penyaluran subsidi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dengan rumah tangga miskin, pelaku usaha kecil, dan analisis kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 kg gas LPG banyak digunakan oleh sektor bisnis komersial, yang menyebabkan kelangkaan bagi rumah tangga miskin. Selain itu, mekanisme pengawasan distribusi yang lemah dan birokrasi yang kompleks memperburuk penyalahgunaan subsidi tersebut. Temuan ini menggaris bawahi pentingnya revisi kebijakan dan penguatan pengawasan melalui teknologi digital untuk melacak distribusi secara lebih akurat. Implikasi dari penelitian ini antara lain peningkatan transparansi dan akuntabilitas

dalam penyaluran subsidi energi, serta perbaikan mekanisme penegakan hukum untuk mengurangi ketidaksetaraan akses subsidi. Rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menciptakan tata kelola subsidi yang lebih adil dan lebih terarah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Distribusi, Efektivitas

---

## PENDAHULUAN

Akses energi yang terjangkau merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, subsidi energi telah menjadi instrumen kebijakan strategis. Salah satu program subsidi yang paling menonjol adalah penyaluran gas LPG sebesar 3 kg, yang diluncurkan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga miskin. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah transisi dari penggunaan bahan bakar minyak tanah, tetapi juga bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dalam mengakses sumber energi. Namun, meskipun kebijakan ini dirancang untuk mendukung kelompok rentan, muncul masalah signifikan terkait implementasinya di lapangan. Fenomena penyalahgunaan gas LPG 3 kg oleh sektor industri dan komersial, seperti bengkel las, laundry, dan restoran, mengindikasikan adanya distorsi dalam alokasi subsidi. Situasi ini mengaburkan tujuan awal kebijakan dan menimbulkan tantangan serius dalam memastikan distribusi yang ditargetkan.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) dalam tabung 3 kg yang lebih dikenal dengan gas LPG merupakan salah satu komoditas penting yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Item ini dikategorikan sebagai komoditas strategis karena memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Ketersediaan LPG 3 kg sesuai dengan tingkat konsumsi masyarakat dalam periode tertentu menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak terkait. LPG juga merupakan bagian dari program konversi minyak tanah. Pemerintah mengganti penggunaan minyak tanah dengan LPG sebagai upaya memastikan ketersediaan BBM dan mengurangi beban subsidi BBM. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada APBN dan menjadi bagian dari kebijakan fiskal strategis nasional dalam beberapa tahun terakhir (Hamzah et al., 2022)

PT Pertamina (Persero) meluncurkan varian kemasan baru, yakni LPG 3 kg, yang disubsidi penuh oleh pemerintah untuk mendorong konsumen minyak tanah beralih ke LPG. Dengan penerapan kebijakan konversi ini, semua agen minyak tanah telah bertransformasi menjadi agen LPG 3 kg. Namun, karena tingginya permintaan di pasar, banyak pelaku usaha baru juga yang masuk ke industri ini. Meningkatnya jumlah pesaing membuat agen LPG 3 kg harus bersaing ketat demi mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Berbagai strategi dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertamina menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga mampu bersaing di era globalisasi. Dalam proses distribusi LPG, Pertamina didukung oleh anak perusahaannya. Salah satunya adalah PT Usaha Mulia Karya Mandiri yang bergerak di bidang distribusi LPG 3 kg. (Fergy Listianty, Harjono, 2018)

Penyaluran 3 kg Liquefied Petroleum Gas (LPG) memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Jika proses distribusi tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, berbagai penyimpangan dapat terjadi, seperti penyalahgunaan dan tindak pidana, yang berpotensi menyebabkan kelangkaan pasokan LPG 3 kg. Oleh karena itu, pemerintah telah merancang sistem distribusi LPG 3 kg sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui Pertamina sebagai pelaksana pengadaan dan distribusi, pemerintah telah

menetapkan mekanisme distribusi yang terstruktur. Sistem ini dimulai dari LPG Bulk Filling Station (SPBE) yang merupakan tempat pengisian LPG dalam jumlah besar, kemudian disalurkan ke agen sebagai distributor utama, dan akhirnya mencapai basis yang merupakan titik akhir distribusi ke konsumen. Selain itu, pemerintah juga menetapkan harga eceran yang harus diterima oleh masyarakat, dengan harapan LPG 3 kg tetap dapat diakses dengan harga yang terjangkau. (Norjanah dkk., nd)

Meskipun kebijakan penyaluran LPG 3 kg secara resmi ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pada kenyataannya kebijakan ini menghadapi kendala implementasi yang serius. Salah satu masalah utama adalah meluasnya penggunaan LPG 3 kg oleh sektor industri kecil dan perusahaan komersial, seperti bengkel pengelasan, restoran, dan binatu. Praktik ini menciptakan distorsi dalam tujuan penyaluran subsidi, yang awalnya dimaksudkan untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga miskin. Penyalahgunaan ini tidak hanya menyebabkan alokasi subsidi tidak tepat sasaran, tetapi juga menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya negara yang terbatas. Selain itu, lemahnya pengawasan di lapangan memperparah permasalahan ini, sehingga mengakibatkan kebocoran subsidi yang terus berlanjut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas kebijakan, sejauh mana subsidi ini benar-benar membantu kelompok sasaran yang membutuhkan, dan bagaimana kebijakan dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuannya dengan lebih akurat.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan penyaluran LPG 3 kg di Indonesia, terutama terkait efektivitas penyaluran subsidi kepada kelompok sasaran utama, yaitu rumah tangga miskin. Kebijakan subsidi ini awalnya dirancang untuk meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyediakan energi yang lebih terjangkau. Namun, dalam pelaksanaannya, muncul berbagai kendala, terutama penyalahgunaan oleh sektor industri dan bisnis komersial yang seharusnya tidak mendapatkan manfaat dari subsidi tersebut. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana kebijakan ini telah berhasil mencapai kelompok sasaran yang tepat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan distribusi, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk memastikan bahwa kebijakan ini lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan sosial ekonominya. Melalui pendekatan evaluatif berbasis data, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan kebijakan subsidi energi di Indonesia.

Jurnal pertama berjudul "Strategi Komunikasi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan LPG Bersubsidi (Studi Kasus PT. Cahaya Gasindo Kabupaten Deli Serdang)", ditulis oleh Arif Budimansyah dan Rholand Muary pada tahun 2024, diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Komunikasi UHO, Volume 9, Nomor 3. Penelitian ini menyoroti strategi komunikasi pemasaran yang digunakan oleh PT. Cahaya Gasindo Energy dalam mendistribusikan LPG bersubsidi ke pangkalan dan sub-agen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan direct marketing dan komunikasi interpersonal digunakan untuk membangun kepercayaan dan memahami kebutuhan pangkalan. Selain itu, strategi bauran pemasaran (produk, harga, tempat, promosi) diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Namun, kurangnya promosi ditemukan menjadi faktor utama penyebab penurunan penjualan LPG bersubsidi. Penelitian ini menekankan pentingnya komunikasi pemasaran yang lebih agresif dan terstruktur agar penyaluran LPG bersubsidi lebih optimal. (Nurrohman dkk., 2024)

Jurnal kedua berjudul "Kebijakan Pengelolaan Kebijakan Subsidi Gas Bumi Cair (LPG) 3 Kg Silinder di Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa", ditulis oleh Alief Munandar Hamzah, Nasrul Haq, dan Riskasari pada tahun 2022, diterbitkan dalam Jurnal KIMAP Volume 3, Nomor 1. Penelitian ini mengkaji efektivitas pengelolaan kebijakan subsidi LPG di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi LPG telah diterapkan dengan baik dalam beberapa aspek pengelolaan, seperti perencanaan dan arahan. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan

karena keterbatasan supervisor dan ketidakdisiplinan agen dan basis dalam melaporkan data realisasi distribusi. Studi ini menyoroti pentingnya perbaikan sistem pemantauan dan koordinasi antara pemerintah daerah dan PT. Pertamina untuk memastikan subsidi LPG tepat sasaran. (Hamzah et al., 2022)

Jurnal ketiga berjudul "Analisis Pengaruh Distribusi dan Harga Terhadap Ketersediaan LPG Bersubsidi di Pasar", yang ditulis oleh Gunawan, Arifin, dan Noor pada tahun 2020, diterbitkan dalam Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis, Volume 3, Nomor 2. Penelitian ini membahas dampak sistem distribusi dan kebijakan harga terhadap ketersediaan LPG 3 kg bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara kuota distribusi dan tingkat konsumsi masyarakat menyebabkan kelangkaan LPG, terutama pada periode tertentu seperti musim kemarau dan hari libur nasional. Selain itu, kesenjangan harga antara LPG bersubsidi dan non subsidi juga berkontribusi pada praktik penyalahgunaan, seperti penimbunan dan penyelundupan. Studi ini merekomendasikan penguatan sistem distribusi berbasis digital dan kebijakan harga yang lebih fleksibel untuk mengatasi kelangkaan LPG bersubsidi. (Norjanah dkk., nd)

Jurnal keempat berjudul "Evaluasi Efektivitas Pengawasan Penyaluran LPG Bersubsidi di Kota Padang", yang ditulis oleh Ramadhan, Liesmana, dan Putera pada tahun 2020, diterbitkan dalam Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, Volume 1, Nomor 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan penyaluran LPG bersubsidi 3 kg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah daerah masih memiliki kelemahan, terutama dalam mendeteksi dan mencegah praktik kecurangan, seperti penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) dan distribusi yang tidak sesuai target. Pengawasan manual dinilai kurang efektif, sehingga diperlukan sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penyaluran LPG bersubsidi. Studi ini menyoroti perlunya kebijakan pengawasan yang lebih ketat serta sanksi yang ketat bagi pelanggar. (Fergy Listianty, Harjono, 2018)

Jurnal kelima berjudul "Pengaruh Strategi Distribusi terhadap Aksesibilitas LPG Bersubsidi di Perkotaan dan Pedesaan", yang ditulis oleh Faisal, A., pada tahun 2015, diterbitkan dalam Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau, Volume 2, Nomor 2. Penelitian ini membahas perbedaan aksesibilitas LPG bersubsidi di perkotaan dan pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di perkotaan, akses terhadap LPG bersubsidi lebih mudah karena adanya jaringan distribusi yang luas dan harga yang lebih stabil. Di sisi lain, di pedesaan, masyarakat sering kesulitan mendapatkan LPG subsidi karena jumlah basis yang terbatas dan distribusi yang tidak merata. Studi ini merekomendasikan penguatan infrastruktur distribusi di daerah pedesaan serta insentif bagi agen yang beroperasi di daerah terpencil untuk memastikan bahwa LPG bersubsidi dapat diakses secara merata. (Risal & Situmorang, 2024)

Secara keseluruhan, kelima jurnal ini menggarisbawahi tantangan utama dalam distribusi LPG bersubsidi, mulai dari strategi pemasaran, kebijakan subsidi, pengawasan distribusi, hingga aksesibilitas di berbagai daerah. Solusi yang diusulkan antara lain perbaikan sistem pengawasan berbasis teknologi, penguatan koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha, serta kebijakan distribusi yang lebih fleksibel untuk mengatasi kelangkaan LPG bersubsidi.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas penyaluran subsidi energi, terutama 3 kg LPG, namun terdapat kesenjangan dalam kajian mendalam terkait penyalahgunaan subsidi oleh sektor industri kecil dan komersial. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada efektivitas subsidi dalam konteks ekonomi makro atau dampak sosial dari kebijakan energi bersubsidi, namun tidak banyak yang secara khusus meneliti penyimpangan dalam penerapan subsidi LPG 3 kg dan dampaknya terhadap kelompok sasaran utama, yaitu rumah tangga miskin. Kesenjangan penelitian ini penting untuk diatasi, mengingat indikasi kuat bahwa

alokasi subsidi yang tidak tepat berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam mekanisme distribusi gas LPG 3 kg dan menilai dampaknya terhadap kelompok sasaran yang dituju, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk memperbaiki kebijakan ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting terhadap literatur tentang kebijakan energi bersubsidi dan distribusinya di negara berkembang.

Studi ini menawarkan kontribusi yang signifikan dan orisinal terhadap studi kebijakan distribusi energi bersubsidi, dengan menekankan aspek-aspek baru terkait penyalahgunaan subsidi gas LPG 3 kg oleh sektor industri dan komersial. Meskipun penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya subsidi energi untuk rumah tangga miskin, sangat sedikit penelitian yang secara khusus meneliti dampak negatif dari alokasi subsidi yang tidak ditargetkan. Studi ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena menggabungkan pendekatan evaluatif terhadap kebijakan distribusi dengan data empiris mendalam tentang penyalahgunaan di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana meningkatkan mekanisme distribusi yang lebih efektif dan akuntabel, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Dengan menyoroti aspek-aspek ini, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dalam distribusi subsidi energi, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang relevan bagi pembuat kebijakan di Indonesia.

Akses energi yang terjangkau merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, subsidi energi telah menjadi instrumen kebijakan strategis. Salah satu program subsidi yang paling menonjol adalah penyaluran gas LPG sebesar 3 kg, yang diluncurkan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga miskin. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah transisi dari penggunaan bahan bakar minyak tanah, tetapi juga bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dalam mengakses sumber energi. Namun, meskipun kebijakan ini dirancang untuk mendukung kelompok rentan, muncul masalah signifikan terkait implementasinya di lapangan. Fenomena penyalahgunaan gas LPG 3 kg oleh sektor industri dan komersial, seperti bengkel las, laundry, dan restoran, mengindikasikan adanya distorsi dalam alokasi subsidi. Situasi ini mengaburkan tujuan awal kebijakan dan menimbulkan tantangan serius dalam memastikan distribusi yang ditargetkan.

Meskipun kebijakan penyaluran LPG 3 kg secara resmi ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pada kenyataannya kebijakan ini menghadapi kendala implementasi yang serius. Salah satu masalah utama adalah meluasnya penggunaan LPG 3 kg oleh sektor industri kecil dan perusahaan komersial, seperti bengkel pengelasan, restoran, dan binatu. Praktik ini menciptakan distorsi dalam tujuan penyaluran subsidi, yang awalnya dimaksudkan untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga miskin. Penyalahgunaan ini tidak hanya menyebabkan alokasi subsidi tidak tepat sasaran, tetapi juga menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya negara yang terbatas. Selain itu, lemahnya pengawasan di lapangan memperparah permasalahan ini, sehingga mengakibatkan kebocoran subsidi yang terus berlanjut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas kebijakan, sejauh mana subsidi ini benar-benar membantu kelompok sasaran yang membutuhkan, dan bagaimana kebijakan dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuannya dengan lebih akurat.

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan dalam proses kebijakan publik. Menurut pengertian linguistik, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris "Evaluasi", yang berarti penilaian atau evaluasi. Sementara itu, menurut istilah, evaluasi adalah kegiatan yang

direncanakan untuk mengetahui keadaan suatu benda dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk mendapatkan kesimpulan (Miftah, 1991)

Islami mengatakan bahwa penilaian hikmah (evaluasi) adalah langkah terakhir dari proses hikmah. Salah satu kegiatan fungsional, penilaian hikmah tidak hanya dilakukan dengan mengikuti kegiatan sebelumnya, yaitu pengesahan (formulasi) dan implementasi (implementasi) kebijaksanaan, tetapi dapat terjadi pada semua kegiatan fungsional lainnya dalam proses kebijakan. Penilaian kebijakan dapat mencakup konten kebijakan, implementasi kebijakan, dan dampak kebijakan. Sehingga evaluasi kebijaksanaan dapat dilakukan pada tahap perumusan masalah, perumusan usulan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, legitimasi kebijakan dan sebagainya (Islami, 1904)

Kewenangan evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui empat aspek, yaitu: (1) proses pembuatan kebijakan, (2) proses pelaksanaan, (3) konsekuensi kebijakan, dan (4) efektivitas dampak kebijakan (Wibawa, 1994)

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, (Creswell, 2016) mengevaluasi implementasi kebijakan penyaluran LPG 3 kg di Indonesia, dengan fokus pada analisis mendalam terhadap pengalaman dan persepsi berbagai pemangku kepentingan, termasuk rumah tangga miskin, pelaku industri kecil, dan pihak terkait dalam pengawasan dan pengaturan subsidi energi (Sugiyono, 2014). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan responden yang dipilih secara purposive sampling, dengan kriteria seleksi yang meliputi keragaman demografis dan karakteristik geografis wilayah distribusi LPG. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi partisipatif untuk mengidentifikasi praktik distribusi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Data sekunder, seperti laporan kebijakan, dokumen peraturan, dan data dari lembaga pemerintah terkait, digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas untuk temuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dikategorikan, diorganisasi, dan dianalisis untuk menemukan pola yang mencerminkan tantangan, kesenjangan, dan potensi perbaikan dalam kebijakan penyaluran LPG 3 kg (Lexy J. Moleong, 2013). Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika kebijakan, persepsi publik, dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan sosial ekonomi subsidi energi, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1) Analisis Konteks Kebijakan Distribusi LPG 3 kg**

Kebijakan penyaluran LPG 3 kg di Indonesia merupakan salah satu upaya utama pemerintah untuk menyediakan energi yang terjangkau bagi rumah tangga miskin yang paling rentan terhadap fluktuasi harga energi. Sejak diluncurkan, kebijakan ini bertujuan untuk mengganti penggunaan bahan bakar minyak tanah dengan gas LPG, yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sekaligus meringankan beban ekonomi rumah tangga miskin. Pemerintah melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri ESDM, mengatur penyaluran gas LPG 3 kg sehingga hanya dapat diakses oleh masyarakat yang berhak mendapatkannya. Namun, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan besar, terutama terkait kendala dalam pemantauan distribusi dan penyalahgunaan yang terjadi, dimana 3 kg gas LPG tidak hanya digunakan oleh rumah tangga miskin, tetapi juga oleh sektor industri dan perusahaan komersial. Pembahasan ini akan menggali lebih dalam latar belakang kebijakan, tujuan yang ingin dicapai, dan konteks sosial ekonomi yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan penyaluran gas LPG 3 kg di Indonesia.

## 2) **Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Subsidi Gas LPG 3 kg**

Penyalahgunaan subsidi LPG 3 kg oleh sektor industri dan perusahaan komersial telah menjadi isu utama yang menghambat efektivitas kebijakan ini dalam mencapai tujuannya. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat miskin terhadap manfaat subsidi gas LPG 3 kg yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Meskipun kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban rumah tangga miskin, dalam praktiknya, sejumlah rumah tangga mengeluhkan kesulitan dalam mengakses gas LPG 3 kg karena terbatasnya ketersediaan di pasar, yang sebagian besar disebabkan oleh tingginya permintaan dari sektor industri. Wawancara dengan orang miskin mengungkapkan bahwa mereka sering dipaksa untuk membeli LPG dengan harga lebih tinggi dari harga bersubsidi karena kelangkaan yang disebabkan oleh pengalihan fungsi distribusi ke industri kecil dan perusahaan komersial. Selain itu, beberapa rumah tangga mengeluhkan kualitas pelayanan dari agen distribusi yang tidak transparan dalam menyalurkan subsidi. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan realitas yang terjadi di lapangan, di mana penyaluran subsidi gas LPG 3 kg tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi tetapi juga oleh lemahnya pengawasan dan masalah penegakan hukum dalam mengatur alokasi ke kelompok sasaran yang tepat.

## 3) **Penyalahgunaan Subsidi oleh Sektor Industri dan Komersial**

Penyalahgunaan subsidi gas LPG 3 kg oleh sektor industri dan perusahaan komersial merupakan salah satu isu krusial dalam kebijakan distribusi energi bersubsidi di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa gas LPG 3 kg, yang seharusnya ditujukan untuk rumah tangga miskin, banyak digunakan oleh sektor industri kecil, seperti bengkel pengelasan, binatu, dan restoran. Hal ini terjadi karena rendahnya pengawasan distribusi gas LPG dan lemahnya penegakan hukum terkait alokasi subsidi. Sebagian besar pelaku usaha ini membeli 3 kg gas LPG dengan harga subsidi yang lebih murah, yang seharusnya hanya ditujukan untuk rumah tangga miskin, guna mengurangi biaya operasionalnya. Implikasi dari penyalahgunaan ini sangat signifikan, yaitu berkurangnya jumlah pasokan gas LPG 3 kg yang tersedia bagi masyarakat miskin, yang sebenarnya merupakan kelompok sasaran utama kebijakan subsidi. Selain itu, praktik penyalahgunaan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi subsidi, yang pada akhirnya merugikan kelompok yang seharusnya mendapat manfaat dari kebijakan ini. Untuk itu, penting dilakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pemantauan dan pengaturan distribusi gas LPG 3 kg, serta memperkuat mekanisme pengendalian agar kebijakan ini dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

## 4) **Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Kebijakan**

Efektivitas pemantauan dan penegakan kebijakan distribusi LPG 3 kg merupakan faktor kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi subsidi energi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur distribusi gas LPG, mekanisme pengawasan yang ada dinilai tidak berjalan optimal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan penyaluran gas LPG 3 kg seringkali terhambat oleh faktor birokrasi yang kompleks, sumber daya yang terbatas, dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah yang terlibat. Selain itu, meskipun ada peraturan yang melarang penggunaan LPG 3 kg oleh sektor industri, penerapan pengawasan di lapangan cenderung lemah, dengan sedikit tindakan tegas terhadap pelanggar. Akibatnya, penyalahgunaan subsidi terus merajalela, dan 3 kg gas LPG yang seharusnya ditujukan untuk rumah tangga miskin justru disalurkan ke sektor industri dan usaha komersial. Penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan sistem pengawasan,

termasuk peningkatan kapasitas aparatur pengawas dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau distribusi secara lebih akurat. Selain itu, penguatan penegakan hukum yang konsisten dan transparan akan menjadi langkah penting untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan bahwa subsidi LPG benar-benar menjangkau mereka yang memenuhi syarat.

#### 5) **Kontribusi Kebijakan terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin**

Dampak kebijakan penyaluran LPG 3 kg terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin merupakan aspek fundamental yang perlu dianalisis secara komprehensif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga miskin, namun implementasinya tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai tujuan yang diharapkan. Sebagian besar responden yang merupakan rumah tangga miskin mengungkapkan bahwa meskipun mereka mendapatkan akses ke 3 kg gas LPG dengan harga bersubsidi, kelangkaan pasokan dan harga yang terkadang tidak sesuai dengan subsidi yang ditetapkan, mengurangi manfaat yang mereka terima. Di sisi lain, kelompok industri kecil yang menyalahgunakan subsidi juga mempengaruhi ketersediaan gas LPG untuk rumah tangga miskin. Selain itu, pengaruh kebijakan ini terhadap kualitas hidup masyarakat miskin juga terhambat oleh ketidakpastian distribusi dan rendahnya transparansi dalam proses alokasi subsidi. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara tujuan kebijakan yang ingin memberikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin dengan realitas implementasi di lapangan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran, serta perlunya mengevaluasi dan memperbaiki sistem distribusi sehingga kebijakan tersebut dapat lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

#### 6) **Rekomendasi Kebijakan dan Solusi Perbaikan**

Studi ini memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penyaluran LPG 3 kg di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi yang tidak tepat sasaran dan penyalahgunaan subsidi oleh sektor industri. Salah satu rekomendasi utamanya adalah memperkuat pengawasan distribusi melalui penerapan teknologi digital, seperti sistem pelacakan distribusi berbasis data real-time yang memungkinkan pemantauan yang lebih transparan dan efisien. Dengan menggunakan pendekatan ini, pemerintah dapat mendeteksi penyimpangan distribusi gas LPG sejak dini dan melakukan intervensi yang diperlukan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan penerapan kebijakan diferensiasi harga, di mana 3 kg gas LPG dijual dengan harga yang berbeda untuk kelompok rumah tangga miskin dan sektor usaha, sehingga subsidi benar-benar dapat dioptimalkan bagi mereka yang paling membutuhkannya. Studi ini juga merekomendasikan peningkatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, agar mereka lebih memahami hak dan akses subsidi yang diberikan, serta mendorong partisipasi publik dalam mengawasi distribusi di tingkat lokal. Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan implementasi kebijakan, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin di Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan distribusi LPG 3 kg menekankan pentingnya reformasi kebijakan berbasis bukti untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Studi ini menunjukkan perlunya revisi regulasi terkait kriteria penerima subsidi agar lebih tepat sasaran. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa kesenjangan dalam perumusan kebijakan memungkinkan terjadinya penyimpangan, di mana gas bersubsidi tidak



hanya digunakan oleh kelompok masyarakat yang berhak, tetapi juga oleh usaha mikro dan industri kecil. Untuk memperbaikinya, penting untuk menyelaraskan kebijakan yang mengintegrasikan berbagai sektor, seperti industri dan rumah tangga, guna menciptakan mekanisme distribusi yang lebih jelas dan terkontrol. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan dapat meningkatkan efisiensi pengawasan di tingkat akar rumput. Evaluasi ini menekankan bahwa revisi kebijakan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga subsidi energi dapat memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat miskin sekaligus mengurangi ketergantungan sektor industri terhadap subsidi yang tidak sesuai dengan peruntukan. Reformasi kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi yang tidak tepat sasaran dan menciptakan tata kelola energi yang lebih adil dan efisien.

## REFERENSI

- Creswell, JW (2016). *Desain Penelitian (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran) Edisi Keempat (Cetakan Kesatu)*. Di Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fergy Listianty, Harjono, M. (2018). Analisis Efektivitas Saluran Distribusi Gas Elpiji Bersubsidi di Kawasan Kecamatan Taman Sari. *Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis*, 5(2), 47–54. [www.stie-ibek.ac.id](http://www.stie-ibek.ac.id)
- Hamzah, A. M., Nasrulhaq, N., & ... (2022). Manajemen Kebijakan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 Kg Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. ... *Administrasi Publik* ..., 3. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/7700>
- Islami, MI (1904). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Lexy J. Moleong. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja rosdakarya.
- Miftah, T. (1991). *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Birokrasi*. Widya.
- Norjanah, R., Made, N., Anjasmari, M., & Noorrahman, MF (nd). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI GAS LPG 3 KILOGRAM DI KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN ( Studi Kasus Pada Pangkalan di Desa Batu Merah dan Kusambi Hilir )*. 846–857.
- Nurrohman, Asniar, I., & Achmadi. (2024). Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Brand Pakalolo. *Jurnal Hubungan Masyarakat Media*, 4(1), 10–23. <https://doi.org/10.37090/jmp.v4i1.1355>
- Risal, M., & Situmorang, L. (2024). *IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN PEMBAGIAN SUBSIDI LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 Kg UNTUK WARGA MISKIN DI DESA SUNGAI MANURUNG NUNUKAN*. 12(3), 145–156.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada.